

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bab empat dalam penelitian ini menyajikan hasil dan pembahasan statistik deskriptif dan uji asumsi klasik dari 80 laporan tahunan perusahaan BUMN pada tahun 2014 sampai 2017. Laporan tahunan perusahaan BUMN dikumpulkan dari sampel perusahaan yang terdaftar di BEI dan tidak mengalami merger selama tahun 2014 sampai 2017 serta *sustainability report* bagi perusahaan yang menerbitkan. Analisis dan pembahasan berfokus kepada hubungan dan karakteristik antara variabel independen (praktik *good corporate governance*, kekuatan dewan direksi, dan kepemilikan pemerintah), variabel kontrol (kinerja keuangan, tipe industri, dan ukuran perusahaan) dan variabel dependen (pelaporan anti korupsi).

Pembahasan mengenai statistik deskriptif dan uji asumsi klasik dari pelaporan anti korupsi digunakan guna menjawab pertanyaan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaporan anti korupsi yang dilakukan oleh perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI.

4.2 Hasil Analisis Data

4.2.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai variabel-variabel penelitian, yaitu variabel dependen (pelaporan anti korupsi), variabel independen (praktik *good corporate governance*,

tingkat kepemilikan pemerintah dan kekuatan dewan direksi) dan variabel kontrol (tipe industri, kinerja keuangan, dan ukuran perusahaan).

Data-data yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan atau verifikasi data oleh pihak independen dengan mengambil sampel 2 perusahaan (10%)³ dari total 20 perusahaan. Tingkat validitas data setelah dilakukan verifikasi berada pada angka 94,38%. Terkait proses verifikasi data penelitian ini dapat dilihat pada Lampiran 14. Statistik Deskriptif Variabel Independen

Variabel independen didalam penelitian ini di deskripsikan secara *continuous* dan kategorikal. Tabel 4.1 akan menunjukkan hasil statistik deskriptif variabel independen secara *continuous*.

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Variabel Independen Diukur Secara *Continuous*

Variabel	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Praktik GCG	55,56%	88,89%	73,75%	98,82%
Kepemilikan pemerintah	51,00%	90,00%	64,14%	10,57%

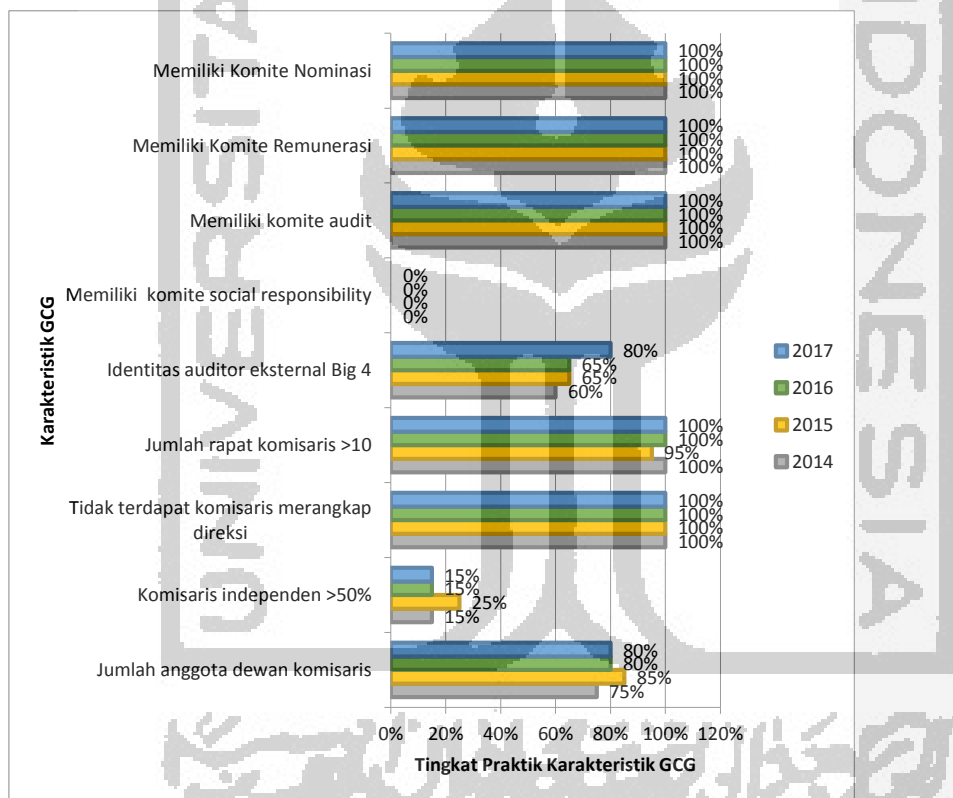
Sumber: Data sekunder diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 4.1 statistik deskriptif di atas menunjukkan bahwa variabel praktik GCG yang diprosikan dengan Indeks *Corporate Governance Score* (CGS) menunjukkan bahwa untuk perusahaan sampel memiliki nilai minimum sebesar 55,56%, sedangkan perusahaan sampel memiliki nilai maksimum

³Penentuan angka 10% menunjuk pada penelitian yang dilakukan oleh Cahaya (2009). Sebetulnya, penentuan terlihat tidak memiliki latar belakang teoritis. Akan tetapi, penentuan angka ini lebih bertujuan untuk verifikasi data sehingga kemungkinan kesalahan pengambilan data dapat diminimalkan.

sebesar 88,89%. Nilai rata-rata praktik GCG dari perusahaan yang diteliti adalah 73,75%.

Praktik GCG terdiri atas 9 karakteristik yang harus diungkapkan serta dipenuhi oleh perusahaan. Adapun mengenai tingkat praktik karakteristik GCG dari tahun 2014-2017 dapat dilihat pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Grafik Tingkat Praktik *Good Corporate Governance* Tahun 2014-2017

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa kriteria yang paling banyak diungkapkan dan dipenuhi adalah kriteria tidak terdapat anggota Komisaris yang merangkap sebagai Direksi, jumlah rapat komisaris >10 dalam satu tahun, memiliki komite nominasi, memiliki komite audit, dan memiliki komite remunerasi; artinya seluruh perusahaan dalam sampel mengungkapkan dan memenuhi lima kriteria tersebut. Disisi lain, kriteria yang paling sedikit diungkapkan dan dipenuhi adalah kriteria jumlah komisaris independen $>50\%$ dan memiliki komite *social responsibility*.

Kurangnya perusahaan dalam memenuhi kriteria jumlah komisaris independen $>50\%$ salah satunya disebabkan karena peraturan BEI yang hanya mewajibkan perusahaan memiliki komisaris independen minimal 30% dari jumlah anggota komisaris. Sehingga berdasarkan laporan tahunan yang telah identifikasi, Penulis menemukan bahwa rata-rata tingkat jumlah komisaris independen hanya sebesar yang diwajibkan BEI saja.

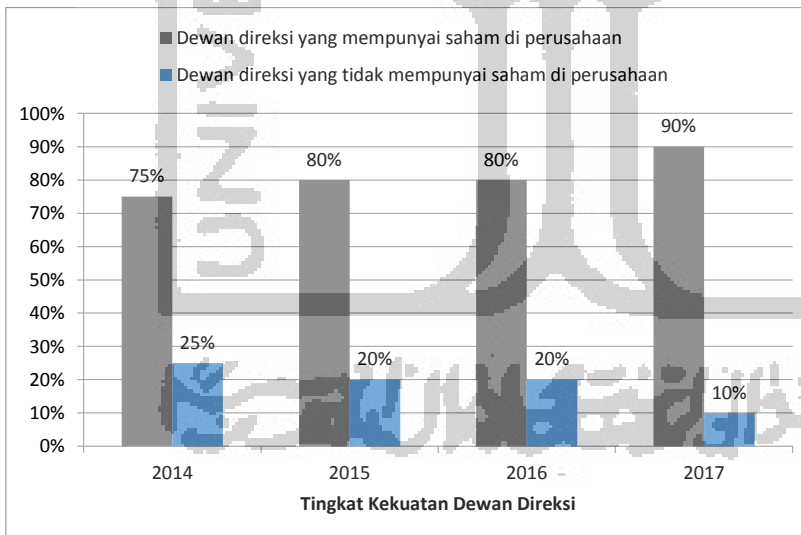
Variabel kepemilikan pemerintah memiliki nilai paling rendah sebesar 51% (PT Pembangunan Perumahan Tbk). Sedangkan kepemilikan pemerintah pada perusahaan sampel yang memiliki nilai paling tinggi adalah sebesar 90,03% (PT Kimia Farma Tbk). Rata-rata kepemilikan pemerintah dari perusahaan yang telah diteliti adalah sebesar 64,19%.

Tabel 4.2 akan menunjukkan hasil statistik deskriptif variabel independen kekuatan dewan direksi secara kategorikal.

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Variabel Independen Diukur Secara Kategorikal

Variabel	Pengukuran	Tahun	Persentase dalam tiap kategori
Kekuatan Direksi Dewan	1= terdapat saham direksi di perusahaan 0=tidak terdapat saham direksi di perusahaan	2014	1 = 75% 0 = 25%
		2015	1 = 80% 0 = 20%
		2016	1 = 80% 0 = 20%
		2017	1 = 90% 0 = 10%

Variabel kekuatan dewan direksi memiliki nilai rata-rata sebesar 0,8125. Adapun mengenai tingkat kekuatan dewan direksi yang diprosikan dengan dewan direksi yang mempunyai saham didalam perusahaan dari tahun 2014-2017 dapat dilihat pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2: Grafik Tingkat Kekuatan Dewan Direksi Tahun 2014-2017

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa mayoritas dewan direksi mempunyai saham didalam perusahaan. Tahun 2014 ada sebanyak 75% dewan direksi yang mempunyai saham di perusahaan, tahun 2015 sebanyak 80%, tahun 2016 sebanyak 80%, dan tahun 2017 sebanyak 90%.

4.2.1.1 Statistik Deskriptif Variabel Kontrol

Variabel kontrol didalam penelitian ini di deskripsikan secara *continuous* dan kategorikal. Tabel 4.3 menunjukkan hasil dari statistik deskriptif variabel kontrol secara *continuous*.

Tabel 4.3: Statistik Deskriptif Variabel Kontrol Secara *Continuous*

	Minimum	Maximum	Mean	Std Dev
Ukuran Perusahaan (dalam jutaan rupiah)	921.548	11.126.248.442	291.113.200	1.257.964.200
Kinerja keuangan- (ROA years average)	-12,33%	20,72%	4,17%	6,08%

Sumber: Data sekunder diolah, 2019

Tabel 4.3 merupakan statistik deskriptif variabel kontrol yang di deskripsikan secara *continuous*. Data pada variabel kinerja keuangan menunjukkan bahwa perusahaan sampel dengan kinerja keuangan paling rendah mempunyai ROA sebesar -12,33% (PT Garuda Indonesia Tbk), kinerja keuangan PT Garuda Indonesia berada dititik minus dikarenakan laba bersih perusahaan yang merugi atas biaya rental banyaknya pesawat yang baru datang, membuat kapasitas kursi meningkat, tetapi tidak dibarengi dengan peningkatan penjualan, sedangkan kinerja keuangan yang paling tinggi mempunyai nilai ROA sebesar 20,72% (PT Bukit Asam Tbk), kinerja keuangan PT Bukit Asam berada dititik paling tinggi

dikarenakan pertumbuhan volume penjualan batu bara. Rata-rata kinerja keuangan mempunyai nilai ROA sebesar 6,087%.

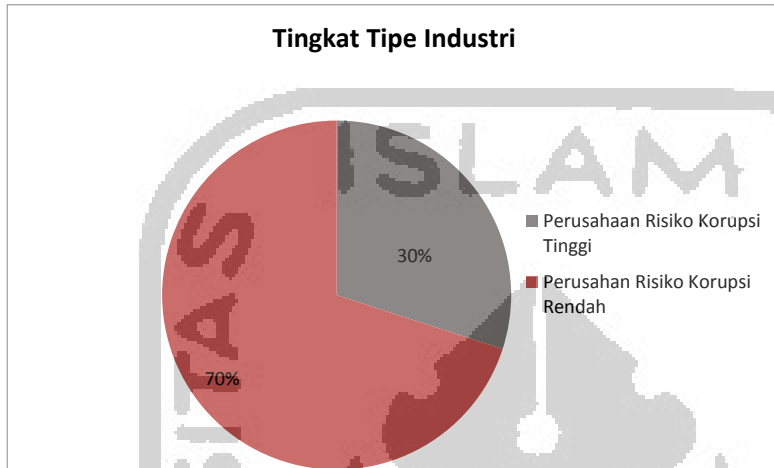
Ukuran perusahaan memiliki nilai paling rendah sebesar Rp. 921.548 Juta (921.548.277.156) yaitu PT Indo Farma Tbk, sedangkan nilai paling tinggi sebesar Rp. 11.126.248.442 Juta (11.126.248.442.000.000) yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.

Tabel 4.4 menunjukkan hasil dari statistik deskriptif variabel kontrol tipe industri secara kategorikal.

Tabel 4.4 Statistik Deskriptif Variabel Kontrol Secara Kategorikal

Variabel	Pengukuran	Persentase
Tipe industri	1 = perusahaan risiko korupsi yang tinggi	30%
	0 = perusahaan risiko korupsi yang rendah	70%

Variabel tipe industri memiliki nilai rata-rata sebesar 0,3. Adapun mengenai tingkat tipe industri yang diprosikan dengan risiko perusahaan terhadap korupsi dari perusahaan sampel tahun 2014-2017 dapat dilihat pada Gambar 4.3



Gambar 4.3 Grafik Tipe Industri Tahun 2014-2017

Gambar 4.3 menunjukkan bahwa tipe industri pada perusahaan sampel memiliki risiko korupsi yang tinggi sebesar 30% dan sebesar 70% memiliki risiko korupsi yang rendah. Dikarenakan tipe industri perusahaan sampel pada tahun pengamatan tetap sama, maka Peneliti hanya menyajikan grafik tipe industri selama satu tahun saja.

4.2.1.2 Statistik Deskriptif Variabel Dependen

Variabel dependen didalam penelitian ini di deskripsikan secara *continuous*.

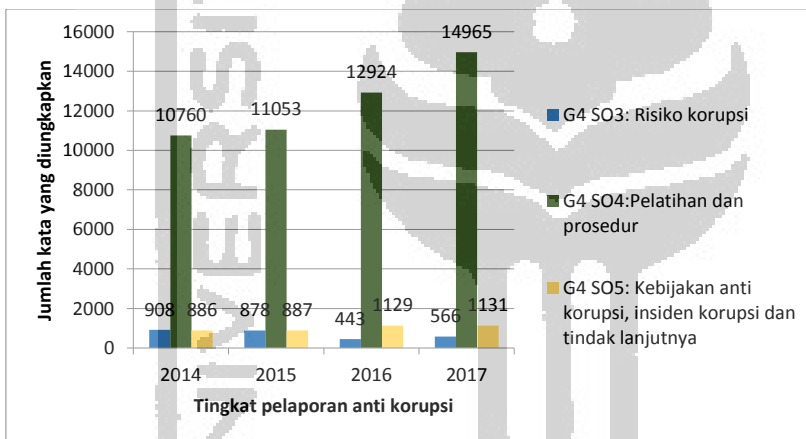
Tabel 4.5 menunjukkan hasil dari statistik deskriptif variabel dependen secara *continuous*.

Tabel 4.5 Statistik Deskriptif Variabel Dependen Secara *Continuous*

	Minimum	Maximum	Mean	Std Dev
Pelaporan Anti Korupsi (dalam kata)	28	1876	706	365,96

Sumber: Data sekunder diolah, 2019

Tabel 4.5 merupakan statistik dekriptif variabel dependen pelaporan anti korupsi dari 20 sampel perusahaan yang dideskripsikan secara *continuous*. Data pada variabel pelaporan anti korupsi menunjukkan bahwa perusahaan sampel dengan pelaporan anti korupsi paling rendah sebesar 28 kata pengungkapan anti korupsi, sedangkan nilai pelaporan anti korupsi paling tinggi sebesar 1876 kata. Rata-rata pelaporan anti korupsi yang dilakukan oleh perusahaan sampel dalam penelitian ini sebesar 706 kata pengungkapan anti korupsi .



Gambar 4.4 Grafik Tingkat Pelaporan Anti Korupsi Pada Tahun 2014-2017

Gambar 4.4 menunjukkan bahwa pada tahun 2014, perusahaan sampel mengungkapkan G4 SO3 sebanyak 908 kata, G4 SO4 sebanyak 10.760 kata, dan G4 SO5 sebanyak 886 kata. Tahun 2015 mengungkapkan G4 SO3 sebesar 878 kata, G4 SO4 sebesar 11.053 kata, dan G4 SO5 sebesar 887 kata. Tahun 2016 mengungkapkan G4 SO3 sebesar 443 kata, G4 SO4 sebesar 12.924 kata, dan G4 SO5 sebesar 1129 kata. Tahun 2017 mengungkapkan G4 SO3 sebesar 566 kata, G4

SO4 sebesar 14.965 kata, dan G4 SO5 sebesar 1.131 kata. Isi dari G4 SO3 adalah mengenai prosentase dan total operasi yang dinilai memiliki risiko terhadap korupsi dan identifikasi risiko secara signifikan, isi dari G4 SO4 memberikan informasi mengenai komunikasi dan pelatihan terhadap prosedur dan kebijakan anti korupsi, termasuk undang-undang pengungkapan anti korupsi dan *whistle-blowing practices*, sedangkan G4 SO5 adalah mengenai peristiwa korupsi dan penanggannya.

Alasan yang mungkin bisa diberikan mengapa perusahaan lebih suka mengungkapkan G4 SO4 dibandingkan G4 SO3 dan G4 SO5 karena selain bisa menjadi pedoman untuk melakukan sistem pengendalian internal yang kuat, G4 SO4 juga memberikan nilai tambah bagi perusahaan di mata stakeholder karena perusahaan dianggap memperhatikan masalah pengendalian anti korupsi.

4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk melihat apakah asumsi-asumsi yang diperlukan dalam analisis regresi linear terpenuhi. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas data secara statistik, uji heteroskedastisitas, dan multikolinearitas.

4.3.1 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2006). Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*. Dasar dari pengambilan keputusan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* adalah karena data yang normal. Data yang normal

ditunjukkan dengan nilai yang signifikan di atas 0,05. Hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* dalam penelitian ini ditunjukkan dalam Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Hasil Uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*

		Unstandardized Residual
N		80
Normal Parameters	Mean	0,000000
	Std. Dev	0,647587
Most Extreme Differences	Absolute	0,137
	Positive	0,082
	Negative	-0,137
Kolmogorov-smirnov Z		1,227
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,098

Sumber: Data sekunder diolah, 2019

Hasil uji normalitas pada Tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai Kolmogorov-smirnov sebesar 1,227 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,098. Hasil tersebut menunjukkan bahwa data residual terdistribusi secara normal, karena nilai p lebih dari 0,05.

4.3.2 Hasil Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel bebas dalam penelitian yang ditemukan dalam regresi. Tabel 4.7 merupakan hasil dari uji multikolinieritas.

Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF
Praktik GCG	0,427	2,343
Kepemilikan Pemerintah	0,855	1,170
Kekuatan Dewan Direksi	0,693	1,443
Tipe Industri(variabel kontrol)	0,438	2,281
Ukuran Perusahaan (variabel kontrol)	0,268	3,729

Kinerja keuangan (variabel kontrol)	0,984	1,017
-------------------------------------	-------	-------

Variabel dependen: Pelaporan anti korupsi

Sumber: Data sekunder diolah, 2019

Hasil uji multikolinearitas pada Tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai tolerance semua variabel diatas 0,10 dan nilai VIF dari semua variabel lebih kecil dari 10. Oleh karena itu, model regresi dalam penelitian ini tidak mengandung masalah multikolinieritas.

4.3.3 Hasil Uji Heteroskedasitas

Uji Heteroskedasitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji glejser. Uji glejser digunakan untuk mengetahui ada tidaknya gejala heteroskedasitas dalam penelian. Tabel 4.8 merupakan hasil dari pengujian heteroskedasitas.

Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedasitas

Variabel	Sig.
Praktik GCG	0,388
Kepemilikan Pemerintah	0,073
Kekuatan Dewan Direksi	0,169
Tipe Industri (variabel kontrol)	0,909
Ukuran Perusahaan (variabel kontrol)	0,645
Kinerja keuangan (variabel kontrol)	0,462

Variabel dependen: abs residual pelaporan anti korupsi

Sumber: Data sekunder diolah, 2019

Pengujian heteroskedasitas dalam penelitian ini menggunakan uji glejser. Uji glejser digunakan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen (Ghozali, 2011). Hasil uji heteroskedasitas pada Tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari praktik gcg sebesar 0,388, kepemilikan pemerintah 0,073, kekuatan dewan direksi 0,169, tipe industri 0,909, ukuran

perusahaan 0,645, dan kinerja keuangan 0,462. Semua hasil tingkat signifikansi dari seluruh variabel tersebut diatas 0,05, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedasitas

4.4 Hasil Regresi Berganda

Tabel 4.9 merupakan hasil uji T dari uji regresi berganda, ujian koefisien determinasi (uji Adjusted R Square) dan uji signifikansi simultan (uji F).

Tabel 4.9 Hasil Regresi Berganda

Variabel	Prediksi Awal	Koefisien	p-value
Constant		7,199	0,000
Praktik GCG	+	1,671	0,039
Kepemilikan Pemerintah	+	1,310	0,013
Kekuatan Dewan direksi	+	0,340	0,253
Tipe Industri	+	-0,114	0,720
Ukuran Perusahaan	+	0,018	0,822
Kinerja Keuangan	+	1,289	0,311
Ringkasan model			
Standard error of estimate		0,529	
Adjusted R square		0,144	
Model Regresi		0,007	

Catatan: level signifikansi 5%

Sumber: Data sekunder diolah, 2019

Dari Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa variabel praktik *good corporate governance* mempunyai nilai *p-value* sebesar 0,039. Oleh karena itu variabel praktik *good corporate governance* mempengaruhi pelaporan anti korupsi karena nilai signifikansi kurang dari 0,05. Dengan demikian maka hipotesisi pertama (H1) diterima.

Variabel independen kepemilikan pemerintah memiliki nilai *p-value* sebesar 0,013. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel

independen kepemilikan pemerintah dibawah 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan pemerintah mempengaruhi pelaporan anti korupsi. Dengan demikian hipotesis kedua (H2) diterima.

Variabel independen kekuatan dewan direksi memiliki nilai p-value 0,253. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel independen kekuatan dewan direksi diatas 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kekuatan dewan direksi tidak mempengaruhi pelaporan anti korupsi. Dengan demikian hipotesis (H3) ditolak.

Tabel di atas menunjukkan hasil uji F statistik dengan tingkat signifikansi sebesar 0,007. Oleh karena signifikansi dibawah 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel praktik *good corporate governance*, kepemilikan pemerintah, dan kekuatan dewan direksi secara bersama-sama berpengaruh terhadap pelaporan anti korupsi.

Hasil uji R² pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,144 atau 14,4%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hanya sebesar 14,4% variabel pelaporan anti korupsi dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen praktik *good corporate governance*, kepemilikan pemerintah, dan kekuatan dewan direksi. Sisanya sebesar 85,6% dijelaskan oleh variabel lain.

4.5 Interpretasi Hasil

Hasil dari pengujian yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil adalah terdapat dua variabel independen praktik *good corporate governance* dan kepemilikan pemerintah yang mempengaruhi variabel dependen pelaporan anti

korupsi, sedangkan variabel lainnya, yaitu kekuatan dewan direksi tidak mempengaruhi variabel dependen pelaporan anti korupsi.

Tabel 4.10 Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	β	Nilai p-value	t	Hasil
H1: Praktik <i>Good Corporate Governance</i>	0,335	0,039	2,101	Diterima
H2: Tingkat Kepemilikan Pemerintah	0,286	0,013	2,541	Diterima
H3: Kekuatan Dewan Direksi	0,144	0,253	1,153	Ditolak

4.5.1 Praktik *Good Corporate Governance* (GCG)

Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama, praktik *good corporate governance* mempengaruhi pelaporan anti korupsi. Sehingga ketika semakin baik praktik *good corporate governance* suatu perusahaan maka semakin besar tingkat pelaporan anti korupsi perusahaan. Dalam teori *coercive isomorphism* menjelaskan bahwa perusahaan akan mendapatkan tekanan dari stakeholder yang terefleksikan dalam indikator *corporate governance score* (CGS) hal tersebut akan membuat perusahaan melaporkan pengungkapan anti korupsi. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Healy dan Serafeim (2016) bahwa praktik *good corporate governance* berkaitan dengan peningkatan peringkat anti korupsi. Penelitian yang dilakukan oleh Jayanti (2016) menunjukkan hubungan yang positif bahwa GCG mempengaruhi luasnya pengungkapan CSR. Hal ini juga didukung oleh pernyataan Kementerian BUMN yang meminta agar semua kegiatan BUMN terus berpedoman pada tata kelola perusahaan yang baik (GCG) untuk menghindari praktik korupsi (Ramadhan, 2019).

Implikasi membuktikan bahwa praktik *good corporate governance* yang semakin baik mengakibatkan semakin tinggi pula tingkat pelaporan anti korupsi pada suatu perusahaan karena praktik *good corporate governance* mencerminkan bahwa perusahaan berkomitmen tinggi terhadap praktik anti korupsi yang ada di perusahaan. Hal ini juga diharapkan bagi perusahaan untuk memperhatikan praktik *good corporate governance* yang dapat mempengaruhi adanya upaya pelaporan anti korupsi oleh pihak manajemen perusahaan.

4.5.2 Kepemilikan Pemerintah

Berdasarkan hasil uji hipotesis kedua, variabel kepemilikan pemerintah secara statistik mempengaruhi pelaporan anti korupsi. Tingkat kepemilikan pemerintah yang tinggi mencerminkan potensi kekuatan pemerintah dalam menekan perusahaan untuk melakukan praktik tertentu, termasuk praktik pengungkapan anti korupsi. Dalam teori *coercive isomorphism*, kepemilikan pemerintah dapat mengendalikan kebijakan yang akan diambil oleh perusahaan agar sesuai dengan kepentingan pemerintah untuk melaporkan pelaporan, termasuk pelaporan anti korupsi. Pemerintah yang juga bertindak sebagai regulator, apabila mempunyai proporsi saham didalam perusahaan, maka pemerintah akan mempunyai kekuatan untuk menekan perusahaan mematuhi peraturan pemerintah mengenai CSR. Maka semakin tinggi nilai dari kepemilikan saham pemerintah yang ada di perusahaan maka semakin besar kekuatan pemerintah dalam menekan BUMN untuk mengungkapkan informasi. Penelitian yang dilakukan Amran dan Devi (2008) dan Cahaya, Porter, Tower, dan Brown (2012) menunjukkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan pemerintah mampu meningkatkan pelaporan anti

korupsi perusahaan karena pemerintah mampu menekan perusahaan untuk mengungkapkan pelaporan anti korupsi. Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Julia dan Erwin (2013) yang menyatakan bahwa tingkat kepemilikan pemerintah mempunyai hubungan yang positif terhadap pengungkapan CSR

Implikasi terhadap kepemilikan pemerintah berpengaruh dalam pelaporan anti korupsi yang dapat mengindikasikan bahwa tingkat kepemilikan pemerintah yang tinggi mencerminkan potensi kekuatan pemerintah dalam menekan perusahaan untuk mengungkapkan informasi tertentu, termasuk untuk melaporkan pelaporan anti korupsi. Pemerintah yang juga bertindak sebagai regulator diharapkan mampu menekan perusahaan untuk mematuhi peraturan pemerintah mengenai CSR.

4.5.3 Kekuatan Dewan Direksi

Berdasarkan hasil uji hipotesis ketiga, variabel kekuatan dewan direksi yang direfleksikan dengan jumlah saham yang dimiliki oleh dewan direksi secara statistik tidak mempengaruhi pelaporan anti korupsi. Teori *coercive isomorphism* gagal menjelaskan hubungan antara kekuatan dewan direksi dan pelaporan anti korupsi. Seharusnya, menurut teori *coercive isomorphism* semakin besar jumlah saham yang dimiliki oleh direksi maka dewan direksi akan merasakan dampak langsung dari setiap keputusan yang mereka ambil, hal ini menyebabkan tekanan terhadap direksi untuk mengungkapkan pelaporan anti korupsi. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan La (2019) yang hasil penelitiannya membuktikan bahwa kekuatan dewan direksi berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan CSR. Tidak ditemukannya hubungan kekuatan

dewan direksi dengan pelaporan anti korupsi diduga karena proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh dewan direksi. Tingkat kepemilikan saham direksi dalam perusahaan di Indonesia masih sangat rendah. Hal tersebut membuat direksi tidak mempunyai kekuatan untuk menekan perusahaan agar melaporkan pelaporan anti korupsi. Selain itu menurut Peneliti, direksi lebih berfokus untuk meningkatkan laba perusahaan yang akan lebih menguntungkan bagi direksi dan pemilik perusahaan daripada mengungkapkan pelaporan anti korupsi. Tahun 2017 terdapat tiga BUMN yang terdaftar di BEI yang tidak mencetak laba perusahaan atau merugi, yaitu Garuda Indonesia, Krakatau Steel, dan Indo Farma. Hal ini diperkuat dengan banyaknya BUMN yang tidak menghasilkan laba, BUMN yang mencapai 142 perusahaan ini belum bisa diandalkan dalam menggenjot penerimaan negara (Saleh, 2019). Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Rani, (2015), Trisnawati (2014), dan Sanjaya, Taufik, dan Azhar (2013) yang menunjukkan bahwa kepemilikan saham direksi tidak berpengaruh dengan pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR).

Implikasinya terlihat pada kekuatan dewan direksi, dimana di Indonesia masih sedikit dewan direksi yang mempunyai proporsi saham pada perusahaan. Tingkat kepemilikan saham direksi dalam perusahaan masih sangat rendah. Hal tersebut membuat direksi tidak mempunyai kekuatan untuk menekan perusahaan untuk melakukan pelaporan anti korupsi.

4.5.4 Variabel Kontrol

Tipe industri, kinerja keuangan dan ukuran perusahaan merupakan variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, ketiga variabel

tersebut secara statistik tidak mempunyai hubungan yang signifikan terhadap pelaporan anti korupsi. Tipe industri yang direfleksikan dengan risiko korupsi tinggi dan rendah tidak terbukti adanya keterkaitan dengan pelaporan anti korupsi dalam penelitian ini. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2018) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tipe industri tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan pelaporan anti korupsi. Jika dilihat di lampiran 6, dapat diketahui bahwa tipe industri yang direfleksikan dengan perusahaan dengan risiko korupsi yang rendah yaitu 0 (PT Aneka Tambang tahun 2014) mempunyai pengungkapan pelaporan anti korupsi sebesar 701 kata dalam perhitungan content analysis, sedangkan perusahaan dengan risiko korupsi yang tinggi yaitu 1 mempunyai pengungkapan pelaporan anti korupsi sebesar 632 (PT Bank Mandiri) dalam perhitungan content analysis.

Kinerja keuangan secara statistik tidak mempunyai hubungan dengan pelaporan anti korupsi. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2017) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kinerja keuangan tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan pelaporan anti korupsi. Jika dilihat di lampiran 11, dapat diketahui bahwa kinerja keuangan yang direfleksikan dengan ROA-2 years average mempunyai nilai paling rendah yaitu sebesar -12,33% (PT Garuda Indonesia) mempunyai pengungkapan pelaporan anti korupsi sebesar 638 kata dalam perhitungan content analysis, sedangkan kinerja keuangan mempunyai nilai paling tinggi sebesar 20,72% (PT Bukit Asam) mempunyai pengungkapan pelaporan anti korupsi sebesar 816 kata dalam perhitungan content analysis. Berdasarkan hasil tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja

keuangan tidak mempunyai pengaruh dengan pelaporan anti korupsi dalam penelitian ini.

Ukuran perusahaan secara statistik juga tidak mempunyai hubungan dengan pelaporan anti korupsi. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2018) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan pelaporan anti korupsi. Jika dilihat di lampiran 12, dapat diketahui bahwa ukuran perusahaan paling rendah yaitu sebesar 921.548.277.156 (PT Indo Farma) mempunyai pengungkapan pelaporan anti korupsi sebesar 633 kata dalam perhitungan content analysis, sedangkan ukuran perusahaan paling tinggi sebesar 11.126.248.442.000.000 (PT Bank Rakyat Indonesia) mempunyai pengungkapan pelaporan anti korupsi sebesar 673 dalam perhitungan content analysis. Berdasarkan hasil tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan tidak mempunyai pengaruh dengan pelaporan anti korupsi dalam penelitian ini.